
9

TRILOGI PEMBANGUNAN

Pembangunan adalah suatu perjuangan, yaitu perjuangan untuk meningkatkan harkat martabat dan taraf hidup manusia. Bagi Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan agar perjuangan itu mampu mengantarkan dan menegakkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmur. Amanat perjuangan itu secara jelas dijabarkan sebagai tujuan pembangunan nasional dalam GBHN.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai". Untuk melaksanakan amanat perjuangan tersebut bangsa Indonesia dengan bimbingan dan tutunan pemerintah telah berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan pembangunan yang menyeluruh dan terpadu. Menyeluruh karena pembangunan mencakup banyak bidang dan tersebar di seluruh wilayah tanah air, serta terpadu karena pembangunan harus mampu sekaligus mencapai masyarakat yang makmur, adil dan merata, walaupun pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap tetapi berkesinambungan. Dengan demikian seperti dinyatakan dalam GBHN: "... hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia ...".

Sampai pada saat ini tiga tahap pembangunan sebagaimana tercermin dalam tiga PELITA telah dilalui. Banyak hasil telah dicapai, namun masih banyak pula masalah-masalah yang harus dipecahkan dan tantangan yang harus dihadapi. Pendapatan riil per kapita yang menggambarkan tingkat kemakmuran sudah menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Kalau zaman Orde Lama pendapatan riil per kapita penduduk Indonesia mandeg atau bahkan menurun, maka sejak 1982 tingkat pendapatn riil per kapita sudah menjadi demikian mantap. sehingga Indonesia tidak lagi dimasukkan sebagai negara yang miskin di dunia ini. Demikian juga usaha melengkapi kenaikan tingkat kemakmuran kuantitatif itu dengan peningkatan kualitas hidup telah menunjukkan hasil yang nyata. Tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, penyediaan tempat ibadah, pengembangan kesenian, dan sebagainya telah menyebabkan kualitas hidup manusia Indonesia semakin bertambah baik. Walaupun demikian berlangsungnya resesi dunia yang berkepanjangan menyusutnya ekspor minyak yang menjadi tumpuan bagi penyediaan dana pembangunan serta melemahnya kegiatan ekonomi, terutama yang menyangkut ekspor, merupakan hambatan besar bagi usaha pencapaian tujuan tersebut. Sementara itu usaha memerangi kemiskinan dan pelaksanaan delapan jalur pemerataan masih tersendat-sendat. Keberhasilan usaha itu memang memerlukan partisipasi seluruh rakyat dan waktu yang panjang. Tetapi menyadari bahwa pembangunan tanpa

pemerataan hanya akan menimbulkan akibat-akibat sosial dan politik yang tidak menguntungkan, maka sejak REPELITA III Pemerintah tetap bertekad untuk melaksanakan pembangunan dengan sasaran utama pada *Trilogi Pembangunan* namun dengan menonjolkan aspek pemerataannya. Trilogi Pembangunan adalah pedoman pelaksanaan pembangunan yang meliputi unsur-unsur :

- 1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
- 3) stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Trilogi Pembangunan yang terdiri dari tiga unsur tersebut harus dilaksanakan sebagai *satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terpadu dan serasi*, namun penonjolan salah satu unsur dapat saja dilakukan mengingat situasi dan kondisi yang dihadapi pada REPELITA I yang dimulai pada tahun 1969 penonjolan diletakkan pada unsur *stabilitas* karena masyarakat masih dihadapkan pada situasi dan kondisi yang timbul sebagai akibat pemberontakan G30S/PKI dan perasi-operasi pembersihan berikutnya. Berbagai hambatan yang berupa pola pikir, pola kerja dan tata nilai memerlukan pembenahan agar dapat disesuaikan dengan pola pikir, pola kerja dan tata nilai yang sesuai bagi pembangunan. Tetapi semua itu hanya dapat dilakukan apabila kondisi stabilitas dapat dijamin. Sesudah pembangunan berencana dilaksanakan selama 5 tahun yang pertama, situasi dan kondisi masyarakat sudah menjadi lebih stabil, sedang landasan ekonomipun sudah mulai bertambah mantap. Karena itu REPELITA II meletakkan penonjolan pembangunan pada unsur *pertumbuhan ekonomi* untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas kegiatan ekonomis, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan meningkatnya pendapatan nasional diharapkan kebutuhan hidup rakyat dapat dipenuhi, kesempatan kerja dapat diperluas guna menampung tambahan angkatan kerja yang tumbuh bersamaan dengan meningkatnya jumlah meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Harapan meningkatnya pendapatan riil selama REPELITA II memang benar-benar dapat direalisasikan , apalagi pada saat itu nilai ekspor Indonesia dari minyak bumi mengalami beberapa lonjakan yang besar, baik karena meningkatnya produksi maupun terutama karena meningkatnya harga minyak bumi di pasaran internasional. Tetapi tampaknya laju pertumbuhan ekonomi yang pesat belum mampu diimbangi oleh distribusi hasil pembangunan maupun pembangunan sendiri dalam proporsi yang memadai. Karena itulah dengan didahului oleh pidato Presiden di depan anggota-anggota DPR pada tahun 1978 yang berisikan penjabaran pemerataan

menjadi *delapan jalur pemerataan*, REPELITA III meletakkan penonjolan pada unsur *pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya*.

Kedelapan jalur pemerataan itu adalah :

- a) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan.
- b) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- c) pemerataan pembagian pendapatan.
- d) pemerataan kesempatan kerja
- e) pemerataan kesempatan berusaha
- f) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
- g) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
- h) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Belum semua delapan jalur pemerataan itu telah dapat dilakukan dengan mantap. Usaha pemerataan adalah usaha jangka panjang, karena dalam melaksanakan usaha itu usaha peningkatan produksi dan produktivitas serta usaha menjamin kondisi stabilitas nasional yang mantap juga harus dilakukan secara bersama-sama dan serentak. Dengan terbatasnya sumberdaya yang tersedia, maka usaha-usaha itu harus dilaksanakan secara hati-hati dan berkesinambungan agar usaha mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata benar-benar dapat terlaksana.

RANGKUMAN

- 1) Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan bangsa. Bagi Indonesia, pembangunan nasional merupakan pembangunan serba muka karena kita memandang pembangunan nasional sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
- 2) Pembangunan di Indonesia dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara berkesinambungan terus-menerus dan bnerangkaian seperti dinyatakan dalam Pola Umum Pembangunan Nasional.
- 3) Pola Umum Pembangunan Nasional itu dijabarkan dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dan Pola

Umum Pelita. Pola Umum Pelita merupakan gambaran pola pembangunan jangka menengah.

- 4) Pada REPELITA-REPELITA yang telah berlangsung, pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan tiga sasaran utama, yaitu Trilogi Pembangunan yang terdiri dari unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Tiga unsur Trilogi Pembangunan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terpadu dan serasi.

9.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

9.1.1 ARTI DAN KEGUNAAN

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan seberapa jauh usaha bangsa dalam meningkatkan kemakmuran kuantitatif mereka dalam bentuk meningkatnya produksi barang dan jasa. Seperti telah kita ketahui, besarnya produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dinamakan pendapatan nasional negara itu (lihat kembali modul kedua). Semakin tinggi pendapatan semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa, dan dengan demikian semakin banyak pula kebutuhan-kebutuhan baik biologis maupun sosial yang dapat dipenuhi. Dengan kata lain, dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi, masyarakat menjadi bertambah makmur. Karena itu dikatakan bahwa pendapatan nasional per kapita merupakan *indikator kemakmuran material* sesuatu bangsa/negara. Walaupun demikian pendapatan nasional per kapita bukanlah satu-satunya bangsa/negara. Walaupun demikian pendapatan nasional per kapita bukanlah satu-satunya ukuran kemakmuran material. Di samping pendapatan nasional per kapita kita masih harus pula melihat sejauh mana pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan sosial yang lain telah dapat dinikmati oleh masyarakat negara itu. Tinggi dan luasnya pelayanan-pelayanan tersebut menggambarkan sejauh mana masyarakat sudah dapat menggunakan pendapatannya untuk mempertinggi *kualitas hidupnya*. Masyarakat yang berpendapatan tinggi (per kapita riil), tetapi masih banyak anggotanya yang buta huruf tentu tidak dapat dikatakan benar-benar makmur, karena mereka itu tidak akan mampu menikmati indahnya buku-buku, tidak akan mampu meningkatkan kualitas mereka karena pengetahuan pada umumnya tertulis dalam buku-buku. Demikian pula dengan pelayanan kesehatan. Masyarakat yang berpendapatan tinggi (per kapita riil) tetapi kalau sakit tidak dapat memperoleh

pelayanan dokter dan rumah sakit yang cepat, tidak mengetahui dan menyadari pentingnya gizi, dan sebagainya tentu sulit dikatakan hidupnya makmur. Pelayanan sosial lain, seperti hiburan, pariwisata, akses pada air bersih, dan sebagainya merupakan indikator pula bagi tingginya dan luasnya kualitas hidup yang dapat dinikmati oleh anggota masyarakat. Karena itu tingginya tingkat kemakmuran suatu bangsa/negara dapat ditunjukkan oleh tingginya tingkat pendapatan per kapita riil plus kondisi pelayanan tersebut (yang disebut juga sebagai indeks kualitas hidup).

9.1.2 ARAS DAN LAJU PERTUMBUHAN

Sejauh REPELITA I usaha pembangunan yang telah kita lakukan bersama telah mampu memberikan hasil-hasil yang cukup memadai Aras pendapatan nasional telah meningkat dengan cepat, dari Rp.2.718 milyar pada tahun 1969 menjadi Rp.59.633 milyar pada tahun 1982 (perkiraan sementara). Tetapi selama itu penduduk juga meningkat relatif cepat, sehingga pendapatan itu per kapita riil penduduk Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah daripada pendapatan per kapita yang benar-benar diterima (nominal).

Dari besarnya aras pendapatan nominal dan besarnya aras pendapatan nasional per kapita dapat dihitung besarnya laju pertumbuhan pendapatan tersebut dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan pendapatan per kapita menggambarkan kecepatan pertambahan "kemakmuran" penduduk Indonesia, pukul rata. Kalau angka yang digunakan adalah angka yang sebenarnya menurut harga yang berlaku), maka besaran-besaran yang diperoleh masih dipengaruhi oleh perkembangan harga-harga umum, sedangkan penggunaan angka yang sudah dideflasikan pada tahun dasar menghasilkan besaran-besaran yang riil, artinya sudah dihilangkan pengaruh harga-harga sesuai dengan tahun dasar yang digunakan.

Tabel-tabel berikut menggambarkan perkembangan atas pendapatan nasional Indonesia serta laju pertumbuhannya.

Tabel 1
Aras Pendapatan Nasional dan Laju Pertumbuhannya

Tahun	Menurut harga berlaku (milyar rupiah)	Menurut harga konstan 1973 (milyar rupiah)	Laju Pertumbuhan	
			Harga berlaku	Harga* konstan
1969	2.718,0	4.820,0	—	—
1970	3.238,0	5.182,0	19,13	7,51
1971	3.672,0	5.544,7	13,40	6,70
1972	4.564,0	6.067,2	24,29	9,42
1973	6.753,4	6.753,4	47,97	11,31
1974	10.708,0	7.269,0	58,56	7,63
1975	12.642,5	7.630,8	18,07	4,98
1976	15.466,7	8.156,3	22,34	6,89
1977	19.033,0	8.882,0	23,06	8,90
1979	32.025,5	10.164,9	40,80	6,89
1980	45.445,7	11.169,2	41,91	9,88
1981	53.676,6	12.017,4	18,11	7,71

Tabel 2
Aras Pendapatan per Kapita dan Laju Pertumbuhannya

Tahun	Menurut harga berlaku (milyar rupiah)	Menurut harga konstan 1973 (milyar rupiah)	Laju Pertumbuhan	
			Harga berlaku	Harga* konstan
1971	30.909	47.136	—	—
1972	37.533	49.895	21,43	5,85
1973	54.201	54.201	44,41	9,63
1974	83.918	56.967	54,83	5,10
1975	96.803	58.429	15,35	2,57
1976	115.682	61.004	19,50	4,41
1977	138.967	64.846	20,13	6,30
1978	162.471	68.332	16,91	5,36
1979	233.641	70.984	43,80	3,88
1980	309.998	76.118	32,68	7,23
1981	357.606	808.063	15,36	5,18

Sumber : Statistik Indonesia

Dari data yang digambarkan pada Tabel 1 dan tabel 2 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi meningkat pesat pada awal-awal pembangunan ekonomi dimulai, tetapi kemudian menurun sedikit, meningkat kembali dan mencapai puncaknya pada tahun 1980 untuk kemudian menurun lagi dan mencapai dasarnya pada tahun 1982 dengan laju pertumbuhan sebesar 2,25%. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada awal-awal pembangunan terutama disebabkan oleh meningkatnya harga minyak di pasaran dunia yang diikuti pula oleh meningkatnya volume produksi dan ekspor minyak Indonesia. Tetapi sebagai akibat semakin berhasilnya negara maju melaksanakan penghematan pemakaian energi dan deversifikasi sumber energi yang diikuti pula oleh timbulnya resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan, permintaan minyak bumi menurun. Akibatnya volume produksi minyak Indonesia juga menurun. Karena minyak bumi merupakan tiang utama yang menyediakan dana guna menyangga keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia, menurunnya volume produksi dan harga minyak bumi membawa pengaruh yang besar pada kemampuan Indonesia untuk menyediakan dana guna melanjutkan usaha pembangunannya (Kemampuan produksi minyak Indonesia adalah sekitar 1,6 juta barel satu hari, tetapi untuk dapat mempertahankan harga sebesar \$29/barel di pasar dunia, Indonesia hanya diperbolehkan menghasilkan minyak sebesar 1,3 juta barel satu hari, sehingga dari produksi sebesar 616,5 juta barel pada tahun 1977/1978 produksi minyak turun menjadi 570,5 juta barel pada tahun 1981/1982 dan bahkan menurun lagi pada tahun 1982/1983. Demikian juga dengan ekspor-minyak bumi turun dari 483,6 juta barel pada tahun 1977/1978 menjadi 374,5 juta barel pada tahun 1981/1982 dan lebih rendah lagi pada tahun 1982/1983.

Dibandingkan dengan negara lain, baik yang sedang berkembang maupun negara pengekspor minyak lain dan negara maju, pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih tergolong rendah, walaupun sejak tahun 1980 Indonesia sudah dapat digolongkan menjadi negara/bangsa yang berpendapatan menengah oleh Bank Dunia. Tabel di bawah menggambarkan perbandingan pendapatan per kapita Indonesia (dalam dolar Amerika) dengan negara-negara terpilih.

Dari tabel 3 di bawah ini terlihat bahwa pendapatan nasional perkapita Indonesia adalah yang terendah dibanding dengan negara ASEAN yang lain, tetapi sejak tahun 1970 mempunyai laju pertumbuhan yang cukup tinggi, sehingga jika laju itu dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang, pendapatan per kapita Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara ASEAN lain yang tidak memiliki minyak bumi, yaitu Thailand dan Philipina, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Seperti telah dibicarakan di muka, di samping kemakmuran yang terlihat dari pendapatan yang diperoleh, perlu juga diusahakan agar kualitas hidup manusia Indonesia terus-menerus meningkat, sehingga tidak saja kemampuan kita untuk

memperoleh barang dan jasa yang kita perlukan semakin meningkat, tetapi keperluan-keperluan lain yang bersangkutan dengan kenikmatan hidup pun juga harus diusahakan semakin meningkat. beberapa indikator yang menunjukkan tentang kualitas hidup adalah, antara lain, harapan hidup, yaitu berapa harapan hidup seseorang pukul rata, berapa banyaknya dokter per penduduk, berapa besar kalori yang dapat disediakan, berapa banyak bagian penduduk yang sudah melek huruf (sudah dapat membaca), akses pada air bersih, balita (bayi umur lima tahun) yang meninggal, energi yang dikonsumsi per kapita. Indikator tersebut menggambarkan sejauh mana usaha meningkatkan kesejahteraan penduduk telah dapat dicapai dibanding dengan negara lain. Karena data yang tersedia untuk perbandingan adalah data yang sudah agak lama, maka gambaran itu sebenarnya sudah mengalami banyak perubahan. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup manusia Indonesia dan usaha itu masih tetap terus diusahakan. Dengan demikian angka-angka tersebut sebenarnya sudah banyak meningkat, tetapi data untuk perbandingan yang tersedia barulah sampai dengan tahun-tahun yang sudah agak lampau. Namun inti permasalahan yang ingin dikemukakan kiranya tidaklah bantak mengalami perubahan, yaitu dibandingkan dengan banyak negara lain kita masih tertinggal agak jauh, sehingga diperlukan peningkatan usaha-usaha yang telah ada secara terus-menerus dalam batas-batas dana yang tersedia.

Tabel 3
Pendapatan per Kapita Beberapa Negara Terpilih (1980)
(US \$) dan Laju Pertumbuhannya (1970-1980)

NEGARA	Pendapatan per Kapita	Laju Pertumbuhan (%)
ASEAN		
1. Indonesia	430	7,6
2. Thailand	670	7,2
3. Philipina	690	6,3
4. Malaysia	1.620	7,8
5. Singapura	4.430	8,5
PENGEKSPOR MINYAK		
6. Nigeria	1.010	6,5
7. Mexico	2.090	5,2
8. Aljazair	2.050	7,0
9. Irak	3.020	12,1
10. Venezuela	3.630	5,0
11. Libia	8.640	2,2
12. Saudi Arabia	11.260	10,6
NEGARA BERKEMBANG LAIN		
13. India	240	3,6
14. Cina ²⁹⁰	5,8	
15. Tanzania	280	4,9
16. Mesir	580	7,4
17. Argentina	2.390	2,2
18. Brazilia	2.050	8,4
NEGARA MAJU		
19. Jepang	9.890	5,0
20. Amerika Serikat	11.360	3,0
21. Rusia	4.550	—
22. Jerman Barat	13.590	2,6
23. Polandia	3.900	8,9

Sumber : World Development Report 1982.

Tabel 4
Beberapa Indikator Kualitas Hidup Negara-negara Terpilih

NEGARA	H H tahun 1980	Penduduk per dokter 1977	Kematian*) bayi (1-4 tahun) 1980	Akses pada air bersih (%) 1975	Penduduk melek huruf 1977	Energi yang konsumsi per kapita 1979
ASEAN						
1. Indonesia	53	13.670	11	12	62	225
2. Thailand	63	8.220	4	22	84	353
3. Philipina	64	2.810	4	43	75	329
4. Malaysia	64	7.640	2	62	—	713
5. Singapura	72	1.250	1	100	—	5.784
PENGEKSPOR MINYAK						
6. Nigeria	49	4.040	28	—	30	80
7. Mexico	65	1.260	4	62	81	1.535
8. Aljazair	56	5.330	19	77	35	645
9. Irak	56	2.190	7	62	—	664
10. Venezuela	67	930	2	—	82	2.994
11. Libia	56	900	13	100	—	2.254
12. Saudia Arabia	54	1.700	18	84	16	1.984
NEGARA BERKEMBANG LAIN						
13. India	52	3.630	17	33	36	194
14. Cina	64	1.100	5	—	66	734
15. Tanzania	52	17.550	19	39	66	51
16. Mesir	57	1.050	14	66	44	539
17. Argentina	70	530	2	66	93	1.965
18. Brazilia	63	1.700	7	77	76	1.018
NEGARA MAJU						
19. Jepang	76	850	—	100	99	4.048
20. Amerika Serikat	74	580	1	100	99	4.048
21. Rusia	71	580	1	100	99	11.681
22. Jerman Barat	73	490	1	100	99	6.264
23. Polandia	72	610	1	100	98	5.752

Sumber : World Development Report 1982

*) per seribu yang lahir.

9.1.3 KOMPOSISI PRODUK DOMESTIK BRUTO

Komposisi produk domestik bruto menggambarkan proporsi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk Indonesia bersama dengan produktivitasnya. Semakin tinggi proporsi satu sektor dalam PDB, semakin besar pula kegiatan ekonomi penduduk yang dicurahkan dalam sektor itu. Pada awal-awal pembangunan dimulai kegiatan ekonomi Indonesia sebagian dicurahkan pada sektor pertanian sehingga proporsi sumbangan sektor ini dalam PDB Indonesia sangat besar. Tetapi struktur produksi yang terlalu berat ke sektor pertanian pada umumnya menggambarkan rendahnya produktifitas bangsa itu dan dengan demikian juga kemakmurannya. Sektor pertanian adalah sektor yang pada umumnya produktivitasnya rendah, nilai tambahnya relatif kecil dan laju pertumbuhannya relatif lambat. Di samping itu usaha kegiatan ekonomi yang dipusatkan pada sektor ekonomi akan banyak mengalami hambatan karena faktor musim dan keterbatasan lahan pertanian. Karena itu GBHN juga telah menyebutkan bahwa “Pembangunan Jangka Panjang harus pula mampu membawa perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari sektor di luar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar, dan industri menjadi tulang punggung ekonomi bagi penduduk yang hidup dari sektor-sektor di luar pertanian semakin bertambah dan komposisi ekspor akan berubah sehingga ekspor Indonesia akan semakin banyak terdiri dari bahan-bahan yang telah diolah dan barang-barang jadi. Dengan demikian akan berarti meningkatnya ketahanan ekonomi Indonesia terhadap perubahan keadaan alam dan kegoncangan ekonomi dunia”.

Sejauh ini usaha merombak struktur produksi telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Sektor pertanian, walaupun sumbangannya pada PDB secara mutlak terus-menerus bertambah dengan pesatnya, tetapi secara relatif sumbangan itu menurun. Hak itu diakibatkan oleh meningkatnya sumbangan sektor industri, khususnya industri perminyakan, yang akhir-akhir ini telah menunjukkan peningkatan yang sangat cepat sebagai akibat kenaikan harga minyak di pasar dunia dan meningkatnya volume produksi minyak di dalam negeri. Tetapi sektor industri pengolahan yang di masa depan harus kita jadikan tumpuan ekonomi Indonesia masih banyak mengalami hambatan-hambatan dalam perkembangannya. Industri pengolahan di Indonesia masih bertumpu pada industri substitusi impor, yaitu industri yang menghasilkan barang plastik, dan sebagainya. Industri ini memang harus tetap dipertahankan karena pasar di dalam negeri cukup luas dan memberikan kesempatan kerja yang besar bagi penduduk Indonesia. Namun perkembangan industri substitusi impor, yang pada umumnya menghasilkan barang-barang konsumsi sehingga disebut industri hilir, perlu ditinjau dengan pengembangan industri antara dan industri hulu, seperti pabrik yang menghasilkan mesin-mesin, barang setengah jadi, pabrik

besi baja, dan sebagainya. Dengan demikian struktur industri akan menjadi kuat karena terdapat keterkaitan langsung di dalam negeri antara industri hulu, industri antara, dan industri hilir. Usaha ke arah pengembangan keterkaitan itu sudah banyak dilakukan. Banyak pabrik sudah didirikan seperti semen, pupuk, kertas, dan sebagainya, dan tetap diusahakan untuk didirikan lebih banyak lagi. Untuk itu perlindungan industri di dalam negeri perlu diusahakan semaksimal mungkin dengan memperhatikan hubungannya dengan penanaman modal asing dan pencarian pasar bagi ekspor kita. Tabel 5 menggambarkan komposisi PDB selama ini.

Tabel 5
Komposisi PDB Indonesia
(%)
Harga Konstan tahun 1973

Lapangan usaha	1978	1979	1980	1981*)
1. Pertanian	29,48	28,09	24,84	24,48
2. Industri	40,31	42,63	47,71	46,05
– Industri pengolahan	10,64	10,34	11,64	11,69
3. Jasa	30,21	29,28	27,45	29,47

Sumber : Statistik Indonesia, 1982

*) angka sementara

Dari tabel itu terlihat bahwa struktur produksi sudah mengalami pergeseran yang kuat dari sektor pertanian ke sektor industri seperti yang diharapkan. Peranan sektor pertanian pada awal-awal pertumbuhan sangat besar, tetapi sampai pada Repelita III peranan itu sudah menurun sampai di bawah 30%. Namun perkembangan industri pengolahan belum begitu menggembirakan. Tidak saja peranannya masih relatif kecil, sekitar 11-12%, tetapi laju pertumbuhannya juga sangat lambat. Di masa depan kita perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan peranan sektor ini sebab sektor industri pengolahan inilah yang kita harapkan berfungsi sebagai tulang punggung perekonomian kita. Dibandingkan dengan negara lain, sumbangan sub sektor industri pengolahan kita juga terlihat masih relatif rendah.

Tabel 6
Komposisi PDB Beberapa Negara Terpilih
dan Laju Pertumbuhannya

NEGARA	Sektor pertanian 1980	Sektor industri 1980	Subsektor industri pengolahan 1980	Sektor jasa 1980	Laju pertumbuhan sektor industri (1970-1980)
ASEAN					
1. Indonesia	26	42	9	32	11,1
2. Thailand	25	29	20	46	10,0
3. Philipina	23	37	26	40	8,7
4. Malaysia	24	37	23	39	9,7
5. Singapura	1	37	28	62	8,8
Negara Berkembang Lain					
1. India	37	26	18	37	4,5
2. Pakistan	31	25	16	44	5,2
3. Nigeria	20	42	6	38	8,1
4. Mesir	23	35	28	42	6,8
5. Venezuela	6	47	16	47	3,0
6. Brazilia	10	37	-	53	9,3
7. Libia	2	72	4	26	-2,3
8. Saudi Arabia	1	78	4	21	10,2
Negara Maju					
1. Jepang	4	41	29	55	5,5
2. Amerika Serikat	3	34	24	63	1,2
3. Rusia	16	62	-	22	-
4. Polandia	15	64	-	21	-
5. Jerman Barat	2	-	37	-	-

Sumber : World Development Report 1982

9.2. PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN HASIL-HASILNYA

Pemerataan pembangunan berarti pemerataan usaha pembangunan di daerah-daerah sehingga seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di daerah-daerah dapat juga ikut merasakan hasil pembangunan dan dengan demikian bersedia ikut berpartisipasi secara aktif dalam usaha pembangunan.

Pemerataan pembangunan berarti pemerataan hasil pembangunan itu sendiri, jadi barang dan jasa kepada semua anggota masyarakat. Bahwa pemerataan

memegang kunci penting bagi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan sudah disadari oleh semua pihak. Tetapi pemerataan sendiri tidaklah mudah untuk dijabarkan dalam pengertian yang jelas. Apakah arti merata itu? Apakah merata berarti seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dibagi sama rata setiap orang? Ataukah dibagi berdasarkan darma bakti masing-masing anggota? Ataukah dibagi berdasar keperluan anggota masyarakat masing-masing? Kesulitan pengertian itu berkaitan dengan ideologi masing-masing bangsa. Pemerataan bagi mereka yang menganut faham liberal- kapitalis tentu tidak sama dengan pengertian pemerataan bagi mereka yang menganut faham sosialis-komunis dan tidak sesuai pula bagi kita yang berideologi pancasila. Karena itu indikator pemerataan yang sudah banyak dicari orang perlu dimengerti dalam konteks tersebut.

Bagi Indonesia usaha pemerataan sudah dijabarkan dalam apa yang dikenal dalam 8 jalur pemerataan. Sejauh ini usaha-usaha pemerataan telah dilakukan dengan menggunakan berbagai-bagai alat dan dana yang tersedia karena seperti telah kita lihat usaha pemerataan merupakan unsur kesatu dalam Trilogi Pembangunan pada REPELITA III. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak sebagian besar sudah terpenuhi. Masalah makan nampaknya tidak lagi essential dewasa ini. BULOG telah berfungsi dengan baik dalam usahanya untuk menstabilkan dan mengadakan komoditi pangan, sehingga degnan produksi dan produktivitas yang semakin meningkat, masalah pangan tidak lagi menjadi hal yang sangat dirisaukan. Swasembada pangan sebenarnya sudah tercapai jikalau menu makan dan distribusi komoditi pangan dapat dilaksanakan dengan baik. Produksi beras dalam periode 1978-1982, misalnya telah menunjukkan peningkatan yang pesat melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Untuk periode itu laju pertumbuhan produksi beras mencapai 7,9% dengan produksi padi tahun 1981 mencapai lebih dari 22 juta ton. Demikian pula dengan komoditi pangan yang lain. Yang masih menjadi masalah adalah penyediaan papan. Walaupun usaha pemerintah melalui Perumnas dan lain-lain telah banyak dilakukan, masalah perumahan masih tetap merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Tidak saja jumlah rumah yang masih kurang, tetapi juga kualitas rumah dipandang dari segi kesehatan masih sangat perlu ditingkatkan. Masalah sandang nampaknya masih sangat perlu ditingkatkan. Masalah sandang nampaknya sudah dapat diatasi. Kalau pada awal-awal pembangunan kita mulai masalah sandang masih merupakan masalah yang elatif besar, sekarang masalah itu sudah tidak relevan. Produksi sandang sudah jauh lebih dari yang diperlukan dan kini kita bahkan sudah mulai mengekspor produk tekstil keluar negeri.

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan masih terus diusahakan. Dengan berbagai Inpres usaha ke arah penampungan pendidikan dan perbaikan pelayanan kesehatan telah dilakukan. Hasilnya jelas kelihatan. Untuk

pendidikan SD bahkan segera akan dilakukan wajib belajar karena sarana dan prasarana diperkirakan sudah cukup memadai. Hanya pendidikan di tingkat atas, khususnya, di tingkat perguruan tinggi daya tampung nampaknya masih harus terus diperluas. Keharusan akan pendidikan sudah semakin merasuki rakyat Indonesia. Walaupun usaha-usaha membentuk pendidikan terbuka sudah dimulai, tetapi kemampuan untuk menampung keinginan warga masyarakat untuk menambah pengetahuannya dan untuk mempersiapkan diri memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik masih belum sepenuhnya berhasil. Demikian pula dengan pelayanan kesehatan. Walaupun Puskesmas sudah didirikan hampir di setiap kecamatan, tetapi dengan jumlah penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan sedemikian besarnya sehingga pelayanan kesehatan masih sangat minimal. Di samping itu perlu juga diperhatikan masalah penyediaan obat-obatan dan rumah sakit yang dapat dijangkau oleh pendapatan masyarakat.

Di bidang pemerataan pembagian pendapatan usaha yang telah dilakukan baik melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal, moneter, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan sektoral, regional maupun yang bersifat khusus nampaknya walaupun sudah memberikan hasil tetapi belum dapat mencapai sarannya secara sempurna. Seperti telah kita bicarakan di muka usaha pemerataan adalah usaha jangka panjang dan harus selalu diusahakan bersama-sama dan serentak dengan meningkatkan taraf hidup rakyat dalam kondisi stabilitas nasional yang mantap.

Di bidang pemerataan kesempatan kerja usaha juga sudah banyak dilakukan dengan jalan menciptakan lapangan kerja, maupun melalui usaha-usaha lain seperti Inpres-Inpres dan usaha mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Memang harus diakui usaha mengatasi pengangguran dan setengah pengangguran masih sulit. Karena itu usaha memperbanyak kesempatan kerja mesti dibarengi dengan usaha mengurangi angkatan kerja melalui usaha memperlambat kenaikan penduduk (KB).

Tabel 7 menggambarkan keadaan tingkat kerja di Indonesia dan perkembangannya.

Dari tabel itu terlihat bahwa pengangguran dan setengah pengangguran masih relatif besar dan apabila kita mampu membuat KB berhasil secara agak drastis dan pertumbuhan ekonomi tetap dapat dipertahankan pada laju yang cukup tinggi, angka-angka pengangguran dan setengah pengangguran akan terus meningkat. Kondisi itu akan menyebabkan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan akan meningkat lagi dan dapat mempunyai efek yang kurang menggembirakan jika dilihat dari segi sosial dan pembangunan nasional sendiri.

Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air sudah banyak digarap. Dikembangkan BAPPEDA di seluruh propinsi dan kabupaten

Tabel 7
Statistik Angkatan Kerja

	1980 (000)	Laju 1971-1980 (%)
1. Penduduk	146.935	2,32
2. Penduduk Usia Kerja	104.454	2,90
3. Angkatan Kerja (TPAK)	55.005	3,17 (59,69)
4. Penganggur	2.204	10,17
5. Setengah Penganggur	21.341	(38,80 AK)
6. Laju Pertumbuhan (3 + TPAK)	(2.000)	3,23
7. Pekerja di A	54,8%	(71:64,2%)
8. Pekerja di M	12,5%	(72:8,4%)
9. Pekerja di S + Lain	32,7%	(71:27,4%)
10. P e t a n i	55,5%	(72:60,9%)
11. Jasa + Penjualan	17,8%	(71:13,9%)
12. Prop. + Teknisi	3,1%	(71:2,1%)
13. Manajemen + Administrasi	0,1%	(71:0,5%)
14. Lain-lain	23,9%	(72:22,6%)
15. Usia < 24 tahun	AK 28,9%	PEK: 27,7%
16. Pendidikan	88,0%	AKAD: 0,9%
17. Setengah Peng. (jam kerja) total :	≤ 24:12,2% 38,8% AK	≤ 44:27,8%
18. Peng. (< 1 jam/minggu)	≤ 24: 2,4%	≤ 44: 3,5%
19. Upah Min. (Jawa Tengah)	Rp 400,00	- Rp 500,00 per hari
(Bali)	Rp 325,00	- Rp 665,00 per hari
(DKI Jakarta)	Rp 600,00 per hari	
20. KFM 4/83 Jakarta S:	Rp 34.980,00	K:Rp 83.500,00
Medan S:	Rp 3.700,00	K:Rp 80.700,00
Bandung S:	Rp 33.300,00	K:Rp 81.500,00

bertujuan untuk mendorong daerah memacu pembangunan daerahnya dengan arah yang lebih baik dan kecepatan yang lebih tinggi. Walaupun demikian karena setiap daerah memiliki sumber daya alam yang tidak sama, demikian pula sumber daya manusia yang berbeda, tingkat dan laju pembangunan daerah pun tidak bisa sama. Usaha transmigrasi untuk menambah penduduk dan tenaga kerja di daerah yang tipis penduduknya tetapi mempunyai potensi alam yang dapat dikembangkan sudah banyak membantu daerah tersebut dan sekaligus membantu pula pembangunan daerah yang penduduknya sangat padat dan tidak sebanding dengan potensi alam yang dimiliki. Dengan demikian usaha untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah telah dilakukan sejak lama, namun usaha itu masih memerlukan waktu

yang lama untuk dapat memberikan hasil yang diharapkan. Sementara itu , gambaran tentang pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air telah menghasilkan distribusi pendapatan daerah seperti terlihat pada tabel 8.

Tabel 8
Produk Domestik Bruto Propinsi-propinsi di Indonesia dan Laju
Pertumbuhannya serta Komposisinya 1980
(Atas Dasar Harga Konstan 1975)

No.	PROPINSI	per Kapita (Rupiah)	Laju 75-80	Primer (%)	Sekunder /TMB	Tersier
1.	Aceh	256.033*	25,88	18,18	71,47/67,74	10,35
2.	Sumatera Utara	129.643*	9,59	35,80	27,96/19,61	36,24
3.	Sumatera Barat	82.144	8,20	35,43	16,27/ 0,33	48,30
4.	Riau a.	763.898*	-1,65	4,09	86,59/83,11	09,32
	b.	106.862	6,69	29,25	14,25/ 6,55	56,50
5.	Jambi					
6.	Sumatera Selatan	151.295	9,20	29,75	32,78/04,59	37,47
7.	Bengkulu	89.200	10,50	46,80	11,86/00,84	41,34
8.	Lampung	72.769	7,90	46,31	09,83/00,16	43,86
9.	DKI Jaya	259.306	9,80	1,59	21,59/ —	76,82
10.	Jawa Barat	96.137	8,40	29,27	26,22/09,17	44,51
11.	Jawa Tengah	67.675	7,70	40,38	14,41/00,32	45,31
12.	DI Yogyakarta	68.606	7,30	39,30	17,05/00,32	43,65
13.	Jawa Timur	88.755	7,40	36,64	17,27/00,20	46,09
14.	Kalimantan Barat	105.591	9,40	40,90	18,14/00,22	40,96
15.	Kalimantan Tengah	131.972	14,57	42,43	29,03/00,50	28,54
16.	Kalimantan Selatan	119.888	13,50	31,53	05,86/00,32	62,61
17.	Kalimantan Timur a.	828.244*	20,00	7,24	67,25/61,63	25,51
	b.	290.007		20,69	06,45/01/75	72,86
18.	Sulawesi Utara	114.206	11,64	46,27	07,49/01,41	46,24
19.	Sulawesi Tengah	70.146	9,74	51,49	10,68/00,83	37,83
20.	Sulawesi Selatan	90.500	8,45	48,75	07,41/01,34	43,84
21.	Sulawesi Tenggara	74.263*	9,14	36,43	13,65/11,69	49,92
22.	Bali	111.532	12,40	41,95	15,02/00,69	44,03
24.	Nusa Tenggara Timur	56.395	10,59	60,39	05,26/00,16	34,35
25.	Maluku	119.410	10,44	47,73	15,41/07,42	36,86
26.	Irian Jaya	229.257*	11,00	27,39	51,07/46,83	21,54
INDONESIA (73)				30,70	31,00/09,30	38,30

TMB = Tanpa Minyak Bumi

9.3. STABILITAS EKONOMI

9.3.1 ARTI DAN RUANG LINGKUP

Stabilitas, unsur ketiga dalam Trilogi Pembangunan yang dilaksanakan untuk REPELITA III, mengandung pengertian tidak adanya fluktuasi, tidak adanya gangguan pada keadaan ekonomi yang ada yang menyatakan terhambatnya usaha pembangunan. Dengan demikian pengertian dalam pertumbuhan ekonomi menyangkut usaha meminimumkan terjadinya fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi sehingga taraf hidup dapat senantiasa ditingkatkan tanpa melalui fluktuasi yang berarti, tetapi terutama stabilitas dikaitkan dengan harga, baik harga barang dan jasa pada umumnya maupun harga sumberdaya seperti upah, harga sewa, dan laba. Harga barang dan jasa dan maupun harga sumbernya dapat secara umum meningkat tetapi dapat pula secara umum menurun. Adapun harga barang dan jasa secara umum menunjukkan peningkatan, maka kondisi ekonomi negara itu dikatakan sedang menderita penyakit inflasi, sebaiknya penurunan harga barang dan jasa serta harga sumberdaya secara umum disebut *deflasi*. Sesudah Perang Dunia II penyakit yang sering mengunjungi banyak negara di dunia adalah inflasi, bahkan hampir semua negara berkembang, termasuk Indonesia, inflasi merupakan penyakit kronis yang tidak pernah benar-benar meninggalkan tubuh ekonomi negara tersebut.

Mengapa orang banyak ribut dengan inflasi? Setiap kali bapak Presiden berpidato tentang masalah yang ada kaitannya dengan ekonomi nasional masalah inflasi pasti ikut tersinggung. Di koran masalah inflasi hampir dipastikan selalu menjadi bahan pembicaraan. Pasalnya adalah bahwa inflasi merupakan penyakit yang perlu ditanggulangi karena pengaruhnya pada usaha pembangunan. Inflasi berkaitan dengan harga, sedangkan harga, seperti dikatakan Adam Smith, merupakan pengatur jalannya roda perekonomian yang bersendikan mekanisme pasar. Karena semua transaksi ekonomi (sekurang-kurangnya sebagian besar) harus dilakukan melalui pasar, maka terlihatlah bagaimana pengaruh inflasi pada semua atau hampir semua kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk. Secara jelas inflasi berkaitan dan dengan distribusi pendapatan.

Upah dan gaji pada umumnya diterimakan dalam bentuk uang. Pada masa inflasi nilai uang turun. Tetapi biasanya dalam masa inflasi upah dan gaji pun ikut naik karena masa inflasi seringkali bersamaan dengan masa membaiknya kondisi ekonomi. Apakah sebenarnya upah dan gaji riil naik atau turun pada akhirnya harus dihitung tingginya laju inflasi dan tingginya laju kenaikan upah dan gaji. Jika upah dan gaji naik lebih cepat atau lebih besar daripada laju inflasi sebenarnya upah dan gaji riil meningkat. Namun dalam masa inflasi orang pada umumnya mengeluhkan

terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang mereka beli. Konsumen seringkali terkena *ilusi uang*. Mereka selalu mengira pendapatan riil mereka turun walaupun nyatanya tidak selalu demikian. Inflasi pada umumnya juga tidak terpengaruh tepat sama pada barang yang dihadapi konsumen. Harga barang X dapat naik dengan proporsi lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga barang Y. Akibatnya harga barang X dinyatakan dengan harga barang Y, atau *harga relatif*, berubah. Karena proporsi penggunaan barang X dan barang Y bagi seseorang konsumen tidak sama besarnya, perubahan harga relatif dapat lebih merugikan konsumen yang satu dibandingkan yang lain. Hal itu tentu akan mempunyai pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Di samping itu inflasi juga mempengaruhi posisi peminjam uang dan orang yang meminjamkan uang itu. Pada saat harga meningkat peminjam uang lebih diuntungkan karena secara riil nilai hutangnya akan menurun, dan sebaliknya bari orang yang meminjamkan. Keadaan ini juga berpengaruh pada distribusi pendapatan. Mereka yang paling menderita adalah yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri karena gaji tetap tidak berubah, sedang harga meningkat, sehingga gaji riil turun. Karena itu pada saat-saat tertentu gaji pegawai negeri dinaikkan agar gaji riil dapat dipertahankan untuk ditingkatkan sesuai dengan tujuan pembangunan, yaitu terus-meneruskan meningkatkan pendapatan riil masyarakat.

Di samping berpengaruh terhadap penerima pendapatan, inflasi juga mempengaruhi produsen, Untuk memperluas produksinya produsen perlu melakukan perluasan usaha dan untuk itu diperlukan dana yang cukup besar. Dana itu harus dipinjam dari para pemilik modal. Agar perusahaan dapat melakukan usahanya secara sehat dana itu harus dapat dikembalikan dalam jangka panjang. Tetapi dalam masa inflasi pinjaman jangka panjang sangat riskan bagi pihak yang meminjamkan, karena itu jikalau dana sukar diperoleh maka perekonomian dapat berhenti (atau stagnasi). Jadi inflasi pada dasarnya tidak menguntungkan bagi banyak pihak, karena itu inflasi perlu ditanggulangi. Semakin tinggi laju inflasi semakin parah pengaruhnya pada ekonomi. Laju inflasi yang tinggi dan terus meningkat dengan cepat di sebut "*galloping inflation*, biasanya hanya terjadi dalam waktu yang relatif singkat karena akibatnya yang sangat berbahaya sehingga harus segera ditanggulangi. Sebaiknya didapati juga inflasi yang merambat secara perlahan-lahan dengan laju yang relatif rendah tetapi biasanya terjadi dalam waktu yang lama. Inflasi seperti itu disebut "*creeping inflation*". Apapun juga namanya, inflasi dewasa ini telah menjadi penyakit yang terdapat hampir di semua negara di dunia. Bahkan di banyak negara kondisi inflasi cukup parah dan seringkali disertai pula oleh terjadinya stagnasi di sektor produksi. Kondisi seperti itu dikenal sebagai kondisi *stagflasi* yang sangat susah untuk ditanggulangi dengan alat ekonomi yang telah kita punyai dewasa ini. Karena seperti penyakit, stagflasi ini seperti sakit perut tetapi bersamaan dengan tambahan parahnya sakit perut. Alat ekonomi yang ada, seperti kebijaksanaan fiskal,

kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan lain yang bersifat khusus, baik sektoral maupun regional, nampaknya masih belum mampu mengatasi penyakit stagflasi secara sempurna. Akhir-akhir ini mulai dicoba di negara maju, seperti Amerika Serikat, satu jenis kebijaksanaan ekonomi baru, yaitu kebijaksanaan ekonomi yang menekankan pada penyediaan barang dan jasa (*supply-side economics*) sebagai alternatif bagi kebijaksanaan ekonomi yang kita kenal sekarang mula-mula berasal dari Kongres (sedang *supply-side economics* esensinya berasal dari kaum klasik).

9.3.2. INDIKATOR INFLASI

Pengaruh inflasi yang sangat luas bagi jalannya roda perekonomian maupun kondisi sosial ekonomi yang ada memaksa kita untuk mengamati inflasi secara lebih cermat. Untuk itu telah lama orang mencoba mengukur tingkat dan laju inflasi secara kuantitatif. Ukuran yang paling sering dipakai adalah *angka indeks harga konsumen* yang menggambarkan perubahan harga bermacam-macam barang dan jasa, sehingga indeks itu mampu membandingkan kenaikan harga rata-rata yang terjadi di suatu tempat. Khusus untuk Indonesia, laju inflasi diukur dengan menggunakan catatan perubahan harga barang dan jasa yang menyangkut kelompok makanan, kelompok perumahan, kelompok sandang dan kelompok aneka barang dan jasa, dan dikaji berdasarkan perkembangan harga yang terjadi di 17 kota besar di Indonesia (semula digunakan hanya 62 macam barang dan jasa di Jakarta yang merupakan hasil survei biaya hidup tahun 1957/1958, tetapi dengan semakin berkembangnya konsumsi, sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat, maka sejak REPELITA III dimulai, yaitu 1 April 1979, indeks tersebut diubah menjadi indeks harga konsumen yang mencakup pengkajian perkembangan harga 150 macam survei biaya hidup pada tahun 1977/1978). Tabel 9 ini menggambarkan perkembangan laju inflasi di Indonesia sejak pembangunan ekonomi berencana kita dimulai pada 1 April 1969.

Tabel 9
Persentase Kenaikan Indeks Biaya Hidup di Jakarta
dan Indeks Harga Konsumen di Indonesia
1969/1970 – 1983/1984

T a h u n	Persentase Kenaikan
REPELITA I¹⁾	
1969/1970	+ 10,65%
1970/1971	+ 7,78%
1971/1972	+ 0,81%
1972/1973	+ 20,79%
1973/1974	+ 47,35%
REPELITA II¹⁾	
1974/1975	+ 20,10%
1975/1976	+ 19,77%
1976/1977	+ 12,12%
1977/1978	+ 10,08%
1978/1979	+ 11,79%
REPELITA III²⁾	
1979/1980	+ 19,13%
1980/1981	+ 15,85%
1981/1982	+ 9,80%
1982/1983	+ 8,40%
1983/1984 (sampai dengan bulan Desember)	+ 7,33%

Tabel di atas menunjukkan laju inflasi pada REPELITA III telah menunjukkan penurunan yang cukup berarti, sehingga pembangunan ekonomi benar-benar dapat dilaksanakan di atas landasan stabilitas harga yang mantap. Untuk mencapai keadaan itu pemerintah telah banyak memperlakukan kebijaksanaan lama yang masih dipandang relevan. Di bidang pangan kebijakan yang dilakukan pada REPELITA III didasarkan pada kebijaksanaan REPELITA sebelumnya yang pada dasarnya diarahkan guna mencapai tiga tujuan, yaitu meningkatkan penyediaan pangan secara merata di seluruh pelosok tanah air, mencukupi kebutuhan gizi dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, menyeragamkan pola konsumsi pangan agar konsumsi bahan pokok selain beras semakin meningkat sehingga tingkat gizi masyarakat dapat meningkat. Di bidang penyediaan pangan pemerintah telah berusaha meningkatkan pembangunan untuk rakyat melalui PERUMNAS, melalui kesempatan memperoleh kredit perumahan dengan bunga rendah, mendorong pembangunan perumahan melalui pengusaha swasta (real estate) dan sebagainya, namun kebutuhan akan perumahan juga terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan. Di bidang sandang, produksi sandang relatif cukup, sehingga harga tekstil maupun pakaian jadi di pasar relatif, sedang ekspor sandang pun sudah banyak dilaksanakan, ke Eropa, Amerika Serikat, maupun negara lain. Tabel 10 ini menggambarkan indeks harga konsumen menurut kelompok barang serta indeks umumnya.

Tabel 10
Indeks Harga Konsumen Indonesia 1979/1980 - 1983/1984
(1977/1978) = 100

Tahun Anggaran/ rata-rata bulan	Makanan	Perumahan	Sandang	Aneka barang dan jasa	Umum
1979/1980 Maret	144,82	146,70	173,82	139,58	174,14
1980/1981					
Juni	151,32	161,11	178,85	151,27	156,61
September	155,13	164,11	178,85	151,27	156,61
Desember	165,67	168,74	190,80	159,09	167,55
Maret	172,60	171,83	161,88	172,14	
1981/1982					
Juni	174,35	176,86	194,43	163,47	174,73
September	177,38	178,32	197,28	166,70	177,40
Desember	179,34	182,26	198,19	168,76	179,82
Maret	183,38	200,12	200,27	183,90	189,63
1982/1983					
Juni	183,42	202,01	202,03	184,93	190,49
September	186,29	204,96	204,48	187,73	193,41
Desember	192,72	209,76	205,02	189,32	197,85
Maret	189,70	228,76	204,60	210,57	205,99
1983/1984					
April	194,84	233,23	207,81	216,56	210,99
Mei	197,92	234,38	209,21	216,95	212,83
Juni	205,23	234,86	210,18	217,18	216,19
Juli	208,17	235,35	212,12	217,69	217,88
Agustus	207,22	235,36	212,42	219,38	217,83
September	210,48	236,45	212,96	219,51	219,61
Oktober	209,72	237,09	213,24	220,10	219,09
Nopember	209,73	238,02	213,71	221,44	220,20
Desember	212,70	238,08	214,04	221,54	221,53

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 1984/1985

Refleksi dari perkembangan harga barang dan jasa pada pendapatan dapat pula dikaji secara sektoral maupun regional. Karena pada umumnya penyesuaian upah dan gaji pada peningkatan harga barang dan jasa selalu terlihat, sehingga peningkatan pendapatan riil sebagai akibat meningkatnya produktivitas kerja tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan secara baik oleh para penerima upah dan gaji, maka berbagai kebijaksanaan itu diantaranya kebijaksanaan yang menyangkut penentuan upah minimum. Ketentuan tentang upah minimum dibuat tidak saja dalam rangka perlindungan pada para penerima upah dan gaji, tetapi juga didorong oleh kesadaran bahwa pengaturan perubahan nasional akan berpengaruh pada pertumbuhan produksi, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Namun kebijaksanaan upah minimum tidak mudah dibuat, baik karena pengupahan berkaitan dengan produktivitas dan dengan demikian menyangkut kesediaan para pengusaha menerapkan ketentuan itu sebagai bagian dari kebijaksanaan pengelolaan perusahaan mereka, maupun karena perbedaan yang tidak mudah diatasi pada pengupahan antarsektor maupun antar daerah yang berlainan. Walaupun demikian pada tahun 1980/1981 sudah ditetapkan 5 buah upah minimum regional, 53 buah upah minimum secara sektoral dan 248 buah upah minimum subsektora. Pada perkembangan yang terakhir sampai dengan tahun anggaran 1982/1983 secara kumulatif telah ditetapkan 11 buah upah minimum regional, 55 buah upah minimum sektoral-regional dan 291 buah upah minimum subsektoral regional. Tabel di bawah ini menggambarkan perkembangan upah minimum dan maksimal di berbagai sektor sejak 1973.

Tabel 11

Upah minimum dan Maksimum di Berbagai Sektor, 1973 - 1983
(RUPIAH PER BULAN)

Sektor	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	
(Rata-rata upah minimum)												
1. Perkebunan	5.500	7.147	8.429	9.101	10.932	12.993	14.919	17.606	21.877	25.191	26.074	
2. Pertambangan	22.005	29.146	32.452	37.187	41.061	44.118	46.826	60.069	64.510	68.188	71.894	
3. Industri	12.848	17.969	25.099	28.589	29.178	34.720	36.255	42.137	46.299	55.045	64.400	
4. Bangunan	9.284	12.834	17.742	20.665	24.498	25.881	26.381	29.105	29.893	34.125	36.250	
5. Listrik	4.949	9.999	14.262	14.262	14.262	17.318	20.494	21.050	27.279	32.609	52.204	
6. Perdagangan/bank asuransi	13.298	16.098	19.182	25.782	29.754	32.914	34.681	42.112	53.245	62.474	64.730	
7. Perhubungan	15.088	20.645	22.606	23.114	27.051	35.128	36.116	41.972	50.517	58.194	67.881	
8. Jasa-jasa	26.737	26.854	27.837	29.158	29.158	29.158	30.977	33.270	39.391	50.042	54.800	
9. Lain-lain/pegawai negeri	7.540	10.673	13.300	14.300	16.280	16.280	16.280	2.60	32.400	32.400	32.400	
(Rata-rata upah maksimum)												
1. Perkebunan	75.453	107.469	118.314	138.214	150.211	172.530	176.036	191.411	62.721	249.456	283.071	
2. Pertambangan	86.549	132.701	158.178	209.827	269.179	280.337	309.528	446.725	20.025	553.722	717.200	
3. Industri	128.710	172.197	251.242	297.238	333.647	409.246	442.956	496.738	556.348	666.704	706.247	
4. Bangunan	83.913	91.097	117.039	173.590	205.778	287.66	294.840	370.994	455.424	505.423	520.068	
5. Listrik	50.212	63.340	89.595	89.595	135.046	150.196	219.832	231.719	320.299	345.320	465.520	
6. Perdagangan/bank/ asuransi	78.314	125.112	174.181	189.030	250.416	297.695	320.799	361.254	440.503	526.636	544.205	
7. Perhubungan	87.602	141.182	171.991	172.419	205.527	248.405	268.536	382.665	492.624	522.492	537.099	
8. Jasa-jasa	96.059	120.454	125.287	227.235	228.752	228.752	275.233	322.339	359.035	377.955	393.412	
9. Lain-lain/pegawai	51.800	67.850	83.500	84.700	241.200	241.200	241.200	291.500	307.400	307.400	307.400	

1) Sampai dengan bulan Juni

SUMBER : NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 1984/1985

RANGKUMAN

1. Stabil artinya mantap, sehingga stabilitas mengandung arti tidak adanya gangguan pada kemantapan pembangunan ekonomi yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pembangunan ekonomi.
2. Stabilitas menyangkut banyak faktor, tetapi terutama faktor harga barang, jasa maupun sumber daya.
3. Perubahan harga barang, jasa maupun sumberdaya yang terjadi secara umum dan bersama-sama disebut inflasi bila harga itu naik dan deflasi jika harga itu turun. Apabila kondisi inflasi disertai pula oleh kondisi stagnasi di sektor produksi, maka keadaan yang terjadi disebut stagflasi.
4. Tingginya laju inflasi dapat diukur dengan penggunaan indikator inflasi yang berupa angka indeks, yaitu indeks harga yang konsumen merupakan perbandingan harga barang dan jasa sebanyak 150 macam dan tersebar di 17 kota besar di Indonesia.
5. Usaha mengatasi inflasi maupun stagflasi yang dewasa ini banyak mengganggu kelancaran pembangunan ekonomi Indonesia telah dilakukan secara intensif dan berkesinambungan sejak Orde Baru mulai berkuasa, sehingga tingginya laju inflasi sudah dapat ditekan di bawah 10% setahunnya sedang stagnasi di sektor produksi, khususnya industri, sudah ditangani melalui berbagai kebijaksanaan baik yang bersifat umum, sektoral maupun khusus.